

WACANA DAN RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA GOA PINDUL

Rina Widiastuti¹, Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi²

^{1,2} Program Studi Kepariwisata/Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya/Sekolah
Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: ¹rina.widi.astuti@ugm.ac.id

Email: ²ghifari.yuristiadhi@ugm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas wacana dan relasi kuasa antara BUMDes Maju Mandiri dengan pengelola objek wisata di Goa Pindul. Dengan menggunakan analisis wacana Foucauldian, konsep pengembangan dan hubungan antar agen diidentifikasi untuk mengetahui intertekstualitas dan kesesuaian wacana antara BUMDes Maju Mandiri dengan operator Goa Pindul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator baru BUMDes Maju Mandiri dan Goa Pindul memiliki wacana yang dominan yaitu wacana pemberdayaan, dengan nilai, konsep, dan sikap yang berbeda dalam pengelolaan Goa Pindul hingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Hubungan kekuasaan antara lembaga tampaknya sama tapi mendominasi satu sama lain. Bagian penutup menyajikan saran-saran untuk meningkatkan hubungan kekuasaan antara kedua badan tersebut untuk pemahaman yang lebih baik tentang pengembangan pariwisata pedesaan di Bejiharjo.

Kata Kunci: Goa Pindul, Pemberdayaan, Relasi Kuasa, Wacana

PENDAHULUAN

Industri pariwisata di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul (2017) yang menunjukkan peningkatan jumlah obyek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2007 hingga tahun 2016. Jumlah obyek wisata pun bertambah. Jika pada tahun 2007 hanya ada 11 obyek wisata, pada tahun 2016 ada 40 obyek wisata. Pembangunan sektor pariwisata diklaim mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Menurut Immawan Wahyudi, Wakil Bupati Gunungkidul, pada tahun 2017 sektor pariwisata menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah Gunungkidul sebesar Rp30 miliar. Selain itu, di satu obyek wisata saja misalnya Goa Pindul, sektor pariwisata diklaim telah menyumbang sekitar 800 lapangan kerja secara langsung dan 1.000 lapangan kerja tidak langsung (Republika.co.id, 2016).

Kemajuan industri pariwisata di Gunungkidul di satu sisi membawa berkah,

namun di sisi lain juga melahirkan masalah-masalah baru yang beberapa di antaranya tak kunjung usai. Dalam konteks Goa Pindul, yang diklaim pemerintah Gunungkidul telah menyumbang ribuan lapangan pekerjaan baru, konflik datang silih berganti sejak kepopulerannya menarik minat wisatawan pada tahun 2012. Goa Pindul terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo. Di obyek wisata tersebut, sengketa lahan objek wisata, perebutan pengelolaan retribusi wisata, transparansi pengelolaan organisasi wisata, perang harga antar organisasi wisata, konflik masyarakat di sekitar goa dengan organisasi wisata, kualitas pelayanan wisatawan yang buruk, isu kelestarian ekosistem goa, dan konflik internal organisasi wisata adalah permasalahan yang muncul sejak tahun 2013 hingga saat ini. Hasil temuan awal mengenai penyebab beragam permasalahan tersebut adalah adanya relasi kuasa yang tidak setara di antara agen-agen yang mempunyai kepentingan atas Goa Pindul. Relasi yang timpang menyebabkan saluran komunikasi terhambat sehingga upaya mempertemukan beragam kepentingan dalam satu visi misi

pembangunan pariwisata pedesaan tidak dapat tercapai. Meskipun demikian, kecurigaan atas adanya relasi kuasa yang asimetris, yang menjadi akar permasalahan di Goa Pindul, masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Rumitnya permasalahan pariwisata di Bejiharjo tidak bisa dipahami hanya dengan mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut karena selama lima tahun terakhir, agen-agen yang terlibat dalam industri pariwisata di wilayah ini semakin bertambah jumlahnya. Meskipun mengalami perubahan peran, para agen cenderung bertahan dalam situasi konflik. Oleh karena itu, tak sekedar mengungkap siapa saja agen yang terlibat, kita juga perlu membongkar relasi antar agen dalam rentang periode tersebut. Upaya ini bisa dilakukan dengan mengungkap wacana Goa Pindul yang diproduksi dan dipraktikkan oleh para agen. Mengingat jumlah agen yang cukup banyak, penelitian kali ini hanya akan membahas dua agen saja yaitu BUMDes Maju Mandiri dan salah satu operator Goa Pindul. Penelitian difokuskan pada upaya menjawab pertanyaan bagaimana praktik wacana dan relasi kuasa antara BUMDes Maju Mandiri dan operator Goa Pindul?

Penelitian tentang relasi kuasa dan pariwisata telah dilakukan oleh peneliti-peneliti mancanegara. Bramwell & Dorothea (2007) dan Bowen & Altinay (2017) membahas relasi kuasa dan kebijakan pariwisata. Hasil penelitian yang disajikan dalam dua artikel ini mengungkap aktor-aktor yang terlibat dalam penentuan dan penerapan kebijakan pariwisata. Topik relasi kuasa, pariwisata berbasis masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan dibahas dalam artikel Lenao (2017), Keyim (2018), Xue & Kerstetter (2018). Ketiga artikel ini menegaskan kembali pentingnya mengevaluasi penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwa wacana pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan berkelanjutan masih menjadi kepentingan pemerintah. Dalam artikel yang ditulis oleh Nunkoo & Gursoy (2016) dan Nunkoo (2017), relasi kekuasaan dikaitkan dengan kepercayaan dan kebijakan pariwisata. Kedua artikel ini menegaskan pentingnya kajian tentang aspek kepercayaan (*trust*) dan relasi kuasa dalam penelitian bidang pariwisata karena kepercayaan antar aktor mempengaruhi konfigurasi relasi kuasa dan akan berdampak pada keberhasilan pembangunan pariwisata.

Kajian relasi kuasa dalam pembangunan pariwisata di Indonesia juga telah dilakukan oleh Wijaya (2012), Purnaya (2015), dan Karim (2017). Wijaya (2012: 141-155) mengungkap relasi kuasa dan praktik wacana Pariwisata Budaya yang digunakan pemerintah daerah Bali dalam pembangunan pariwisata. Menggunakan konsep *power/knowledge* Michel Foucault, Wijaya menjelaskan adanya relasi kuasa di antara intelektual-intelektual organik konservatif yang mempraktikkan wacana tersebut untuk kepentingan kelompok masing-masing. Purnaya (2015: 39-55) menelaah relasi kuasa antara tiga kelompok yang terlibat dalam pengelolaan Resor Nusa Dua di Bali, pascareformasi 1998. Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi kuasa antar kelompok berubah dari hegemonik menjadi negosiatif dan oposisional. Karim (2017: 81-106) melakukan kajian konseptual atas eksklusifitas pandangan arus utama pariwisata menggunakan konsep kekuasaan Foucault. Kekuasaan dikonseptualisasi dalam sistem tripartite, yaitu wisatawan, penduduk, dan makelar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan produktif dan represif telah menghasilkan pengetahuan wisata.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa kajian tentang relasi kuasa umumnya menggunakan konsep *power/knowledge* Michel Foucault. Konsep ini pula yang akan digunakan dalam pembahasan di artikel ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek material dan lokasi penelitiannya, yaitu destinasi wisata desa Goa Pindul di Gunungkidul.

Penelitian tentang relasi kuasa dalam pembangunan pariwisata di Gunungkidul belum pernah dilakukan. Kajian tentang pariwisata di Gunungkidul lebih banyak difokuskan pada wacana pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat (Yusuf, 2017), isu kelestarian lingkungan (Syahrul, 2017), partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan (Saputro, 2015), dinamika penguasaan tanah di kawasan pesisir (Kurniawan, 2017), dan pemetaan potensi serta perumusan strategi pengembangan pariwisata (Suhadi, 2017). Dari beberapa penelitian tersebut, pendekatan manajerial digunakan oleh hampir semua peneliti untuk menganalisis kondisi pariwisata di Gunungkidul. Mulai dari isu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi serta pengawasan objek wisata dianalisis untuk mengetahui dampak

pembangunan pariwisata bagi masyarakat di daerah ini. Beragam penelitian tersebut tidak menyentuh permasalahan relasi kuasa dalam proses-proses tersebut sehingga penelitian ini akan mengisi celah kajian mengenai relasi kuasa di sektor pariwisata yang masih belum banyak mendapatkan perhatian dari para peneliti di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan tentang dinamika pembangunan pariwisata pedesaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yang merupakan lokasi di mana Goa Pindul berada. Desa Bejiharjo mempunyai penduduk sebanyak 15.240 jiwa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Luas wilayah Bejiharjo adalah 1.825,4825 Ha, yang terdiri dari tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, dan lain-lain. Desa Bejiharjo terdiri dari 20 padukuhan. Dan Goa Pindul terletak di antara dua padukuhan yakni Padukuhan Gelaran I dan Padukuhan Gelaran II. Desa Bejiharjo mempunyai beragam potensi seni dan budaya, mulai dari seni Karawitan, Cokekan, Campursari, Trebang, Thoklil, Rinding, Gejog Lesung, Kethoprak, Jathilan, Wayang Beber hingga perayaan adat istiadat seperti Surtanah, Grejegan, Gumbregan, Methik dan Rasulan. Di Desa Bejiharjo kita juga bisa menemukan situs kepurbakalaan yang menampung benda-benda cagar budaya Megalitikum, berupa Menhir, Punden, dan batu-batu penyusun Kubur Batu, yaitu Situs Sokoliman. Karena kekayaan seni dan budaya ini, pada tahun 1995, melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 325/Kpts/1995, Bejiharjo dinobatkan sebagai Desa Bina Budaya (www.bejiharjo-karangmojo.desa.id, 2019). Ketika pariwisata mulai berkembang di desa ini pada tahun 2010, gelar tersebut tetap tersemat dan kegiatan seni budaya tetap berjalan namun tidak banyak mendapat sorotan media. Sejak popularitas Goa Pindul meningkat dan ditambah dengan mencuatnya konflik di media massa, Bejiharjo lebih dikenal sebagai tempat tujuan wisata daripada desa budaya. Sejak menjadi desa tujuan wisata, Bejiharjo diliputi konflik berkepanjangan. Beragam konflik internal mewarnai pengelolaan objek wisata Goa Pindul, sejak tahun 2011 hingga saat ini. Para agen saling berselisih memperebutkan hak

pengelolaan Goa Pindul dengan pelbagai wacana yang dipraktikkannya.

Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan. Dimulai dari pembacaan diakronik berdasarkan data-data pemberitaan media dan dokumen organisasi, observasi langsung, dan wawancara dengan partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang melibatkan direktur dan staf BUMDes Maju Mandiri dan ketua serta anggota dari salah satu operator Goa Pindul. Seperti penjelasan sebelumnya, saat ini terdapat 11 operator yang melayani wisatawan di Goa Pindul. Empat operator didirikan oleh empat orang yang menjadi pelopor wisata Goa Pindul dan tujuh operator lainnya adalah operator yang muncul setelah Goa Pindul populer di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul. Operator yang dipilih sebagai partisipan ini adalah salah satu dari empat operator pelopor tersebut. Dalam penelitian ini, nama operator sengaja disamarkan dengan sebutan OPW untuk menghindari konflik di kemudian hari. Wawancara ini juga berguna untuk mengetahui perspektif operator terhadap agen lain sehingga peneliti bisa membongkar praktik wacana dan relasi kuasa yang berlangsung. Selain wawancara, metode lain adalah menganalisis manifestasi wacana dari para agen melalui dokumen-dokumen yang mereka miliki dan melakukan observasi langsung.

Peneliti menggunakan analisis wacana Foucauldian karena tidak hanya berfokus pada bahasa dan teks tetapi juga tindakan eksplisit yang mewujudkan dalam semua aspek pembangunan destinasi wisata. Analisis wacana Foucauldian membantu peneliti mengidentifikasi wacana dominan dan relasi kuasa di Bejiharjo, khususnya dalam konteks pengelolaan wisata Goa Pindul. Menurut Foucault, wacana bukan hanya tentang bahasa (Wickman & Kendall, 1999: 35). Wacana adalah sekumpulan pernyataan yang menggunakan bahasa untuk memperbincangkan topik tertentu pada momen sejarah tertentu. Wacana adalah tentang produksi pengetahuan melalui bahasa. Wacana membangun dan memberikan batasan-batasan dalam memaknai objek atau peristiwa. Karena semua praktik sosial mengandung makna dan makna membentuk dan memengaruhi apa yang kita lakukan, maka semua praktik memiliki aspek diskursif (Hall, 1992: 219). Meminjam metodologi analisis wacana Foucauldian dalam

disiplin ilmu psikologi, ada 4 tahap analisis, yaitu: problematisasi, identifikasi teknologi, identifikasi posisi subjek, dan subjektifikasi. Pada tahap problematisasi, proses pembentukan dan pengaturan objek dan praktik diskursif dilacak. Dalam tahap identifikasi teknologi, kemampuan subjek untuk mengatur perilakunya sendiri dalam praktik diskursif dijelaskan. Pada tahap identifikasi posisi subjek, keberadaan subjek dalam praktik diskursif diungkap berdasarkan daftar interaksi mereka dengan pelbagai wacana. Di tahap terakhir, yaitu subjektifikasi, pertanyaan tentang bagaimana subjek berusaha untuk membentuk dan mengubah dirinya dalam tatanan moral tertentu, serta melalui praktik diskursif dan berdasarkan otoritas tertentu diuraikan (Arribas-Ayloon & Walkerdine, 2008: 99)

Dalam kaitannya dengan relasi kuasa, praktik kekuasaan yang mempengaruhi formasi diskursif perlu dibongkar. Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan digunakan dan dilaksanakan melalui jejaring organisasi. Individu yang berada di dalamnya secara bersamaan menjalani dan menggunakan kekuasaan. Individu bukanlah target yang diam dan hanya bisa menyetujui. Mereka selalu melakukan artikulasi kekuasaan. Individu adalah kendaraan kekuasaan, bukan obyek penerapan kekuasaan (Foucault, 1980: 98).

Kekuasaan memiliki beberapa karakteristik khusus. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diperoleh, disita, atau dibagikan. Hubungan kekuasaan tidak bersifat eksternal terhadap hubungan lainnya. Karena kekuasaan datang dari bawah, maka tidak ada oposisi biner antara para penguasa dan yang dikuasai. Hubungan kekuasaan pun bersifat disengaja dan tidak subyektif, karena tidak ada kekuasaan tanpa maksud (Daldal, 2014). Menurut Richardson (dalam Xue dan Kerstter, 2018), kekuasaan tidak hanya ada dalam politik struktur, institusi, dan hubungan sosial; itu juga ada di bahasa dan teks yang dibuat oleh berbagai lembaga dan tertanam dalam konteks sejarah tertentu. Jadi, daripada sekedar fokus pada institusi dan interaksi eksplisit, analisis wacana dibuktikan melalui bahasa, teks, dan ide untuk menunjukkan dinamika kekuatan yang implisit.

Kajian tentang relasi kuasa dalam komunitas cenderung mengarah pada upaya menjawab pertanyaan seperti: "siapa yang berpartisipasi, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menang dalam pengambilan suatu keputusan." Dalam hal pengelolaan Goa Pindul

sebagai objek wisata saat ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan efektif digunakan untuk mengungkap dinamika pembangunan pariwisata di Bejiharjo yang diwarnai beragam konflik selama bertahun-tahun. Pertanyaan-pertanyaan eksplisit dihindari untuk mengurangi resiko munculnya konflik baru antar agen yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dibedakan berdasarkan peran partisipan dalam jaringan agen di industri wisata Bejiharjo. Sesuai dengan teknik pengambilan data yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni wawancara semi terstruktur, pertanyaan tidak diajukan secara berurutan. Jika jawaban dari salah satu pertanyaan yang diajukan telah mencakup beberapa pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan tidak akan diajukan ulang. Berdasarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan ini dan hasil pengumpulan data sekunder, harapannya informasi mengenai wacana dominan dan relasi kuasa dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul dapat dihimpun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melacak Wacana di Goa Pindul

Upaya untuk membongkar praktik wacana di Bejiharjo, khususnya di Goa Pindul, dimulai dengan melacak wacana yang berkembang sejak awal pengelolaannya. Penelusuran diawali dengan mempertanyakan alasan OPW dan BUMDes Maju Mandiri mengelola Goa Pindul sebagai destinasi wisata desa. Mereka pun menyebutkan kata kunci 'pemberdayaan masyarakat' untuk menjelaskan alasan pengelolaan Goa Pindul sebagai daya tarik wisata di Desa Bejiharjo.

Berdasarkan informasi OPW, pada tahun 2010, Goa Pindul mulai dikembangkan menjadi obyek wisata atas inisiatif sebelas orang penduduk lokal Bejiharjo. Dari kesebelas orang tersebut yang dianggap aktif sebagai perintis hanya empat orang saja yaitu: Subagyo, Tukidjo, Ratmin, dan Paryo. Mereka mendapatkan inspirasi untuk pengembangan pariwisata di Goa Pindul dari kisah sukses objek wisata Goa Gong di Pacitan. OPW didirikan dalam wadah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan telah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

OPW menyatakan bahwa mereka berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Bejiharjo. Penduduk yang semula bekerja di luar daerah atau hidup

dari sektor pertanian beralih profesi menjadi pemandu wisata, staf administrasi, staf hubungan masyarakat, pekerja jasa boga atau joki yang bekerja untuk OPW. Kemampuan OPW dalam melibatkan penduduk Bejiharjo sebagai pekerja dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul inilah yang dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, OPW terpecah-belah karena konflik internal organisasi hingga muncul 10 operator lain yang berebut akses pengelola Goa Pindul. Operator-operator baru ini juga yang akhirnya banyak terlibat dalam konflik pengelolaan Goa Pindul sejak tahun 2013 hingga mendapat banyak tuntutan hukum. Pada saat BUMDes mulai aktif beroperasi di Bejiharjo dan mengambil alih status pengelolaan Goa Pindul, OPW terpaksa membuat surat perjanjian kerja sama dan TDUP Jasa Layanan Pramuwisata agar tetap bisa menjalankan usaha.

Wacana pemberdayaan masyarakat yang dipraktikkan OPW tidak jauh berbeda dengan wacana yang digagas oleh BUMDes Maju Mandiri. BUMDes Maju Mandiri didirikan sejak tahun 2016. Meskipun baru beroperasi pada tahun 2017, BUMDes berpendapat bahwa pengelolaan Goa Pindul dan terlibatnya penduduk desa sebagai pekerja di sektor pariwisata merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada pendapat OPW dan BUMDes Maju Mandiri, praktik wacana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Goa Pindul mewujudkan dalam pembentukan organisasi dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, pada kenyataannya, praktik wacana tersebut justru menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah wacana pemberdayaan masyarakat ini bermasalah?

Wacana pemberdayaan di bidang pembangunan muncul dari gerakan kaum tertindas yang mengkritik model pembangunan vertikal pada tahun 1970-an. Kaum feminis *Global South* dan para aktivis radikal mempopulerkan istilah ini pada tahun 1980-an. Mereka mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses transformasi beragam dari bawah ke atas. Bagi mereka, ini adalah proses yang memberikan kesempatan bagi perempuan dan orang miskin untuk mendapatkan kesadaran, secara individu atau kolektif, tentang dinamika dominasi yang memarginalkan mereka, dan untuk membangun kapasitas untuk secara radikal mengubah struktur ekonomi, sosial, dan politik

yang tidak adil. Praktik wacana pemberdayaan yang kritis dan radikal dikooptasi oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional yang dimulai pada 1990-an dan berkaitan dengan wacana perempuan, gender, dan pembangunan. Pada tahun 2000-an dalam wacana dominan tentang pengentasan kemiskinan, praktik wacana pemberdayaan tergeser dan mendapatkan banyak kritik. Pemberdayaan menjadi konsep yang samar-samar, hanya menjadi konsensus palsu, dan telah digunakan untuk melegitimasi kebijakan dan program *top-down* yang ada (Calvès, 2009). Dalam konteks gerakan perempuan, pemberdayaan mengabaikan dimensi pengetahuan, baik pribadi, budaya, atau kelembagaan, yang melanggengkan objektifisasi dan dehumanisasi (Collins, 2000: 289).

Wacana pemberdayaan masyarakat bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak tahun 1993, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program ini diwujudkan dalam pemberian bantuan dana bergulir sebesar Rp20.000.000,00 bagi 20.000 desa di Indonesia, dengan sasaran penduduk miskin, sebagai modal usaha. Program IDT didukung dengan program P3DT (Program Pembangunan Prasarana Pendukung Daerah Tertinggal) yang dicanangkan pada tahun 1995. Program ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan (balilatfo.kemendesa.org, 2018). Pada tahun 1998, muncul PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan) yang menggunakan dana pinjaman Bank Dunia untuk mendanai program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan komunitas dalam diskusi-diskusi perancangan program. Setelah 8 tahun berjalan, kedua program ini menghadapi *closing date* pendanaan sehingga perlu merumuskan ulang program serupa dalam skala yang lebih besar. Pada tahun 2007, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) diluncurkan dengan dana pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency*, *Asian Development Bank*, dan Bank Dunia (pnpm-mandiri.org). Program PNPM Mandiri inilah yang mendukung pembangunan objek wisata Goa Pindul pada tahun 2010.

Tidak jauh berbeda dengan wacana pemberdayaan global yang menuai kritik, praktik wacana pemberdayaan di Indonesia yang termanifestasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri

juga mendapatkan kritik, bahkan dinilai gagal. Hasil penelitian GAPRI (Gerakan Anti-Pemiskinan Rakyat Indonesia) menunjukkan bahwa PNPM Mandiri masih sebatas proyek pembangunan infrastruktur. PNPM Mandiri tidak berhasil meningkatkan produksi pertanian. Sekitar 7.500 desa penerima dana PNPM Mandiri belum berhasil lepas dari kemiskinan (koran.tempo.co, 2013). Menurut Muslim (2017), kegagalan PNPM Mandiri dalam membangun mengentaskan kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan *stakeholders* memahami tujuan program. Buruknya kinerja fasilitator terlihat pada ketidakpatuhan dalam menjalankan prosedur program dan bekerja secara pragmatis dengan hanya mengejar hasil. Sementara itu, kesalahan *stakeholders* memahami tujuan PNPM Mandiri tampak pada pemilihan prioritas program yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.

Berdasarkan penjelasan ini, kiranya tepat jika kita menarik sebuah kesimpulan bahwa, secara umum, wacana pemberdayaan sangat problematik, baik dari segi konsep maupun dari segi pelaksanaannya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat di Bejiharjo yang berbasis wisata, praktik wacananya pun bermasalah karena mengalami penyederhanaan, hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pembentukan organisasi pengelola objek wisata. Wacana pemberdayaan yang mengalami reduksi dan bergeser pada wacana ekonomi semakin bermasalah karena para agen terjebak dalam perebutan modal, misalnya: hak pengelolaan Goa Pindul.

Praktik wacana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata yang dilakukan oleh OPW dan BUMDes dapat diamati dari teknologi yang mereka terapkan. Teknologi yang dimaksud adalah strategi pengaturan sikap dan perilaku dalam praktik diskursif (Arribas-Ayloon & Walkerdine, 2008: 99). Pada tahun 2011, OPW bekerja sama dengan mahasiswa KKN-PPM UGM untuk mengelola organisasi dan promosi pariwisata. Kerja sama ini dilakukan karena OPW tidak memiliki cukup sumber daya pada tahun-tahun pertama beroperasi. OPW menyatakan bahwa tanpa bantuan mahasiswa, ia tidak akan bisa merapikan administrasi organisasi dan melakukan dokumentasi kegiatan. OPW juga mengatur narasi tentang pembangunan objek wisata Goa Pindul. Ia menyusun cerita tentang penemuan dan perjuangannya mengelola Goa Pindul untuk

menegaskan peran pentingnya sebagai perintis wisata di wilayah ini. OPW membuat sebuah video yang diunggah di kanal YouTube dan disisipkan di situs resminya.

...Itu awalnya juga luar biasa susah karena organisasi itu kan terdiri dari 11 orang, tapi ternyata yang kiprah pada waktu itu hanya 4 orang yang sebagai perintis di Goa Pindul, mulai dari membersihkan, mulai dari apa ya, menghilangkan hal-hal yang tidak pantas. Itu banyak sekali. Harusnya 11 orang, tapi yang bekerja hanya 4 orang. Nah, dari 4 orang itulah kami, apa ya, setiap hari berjuang di situ, sampai memerlukan waktu 4 bulan. Jadi makanya kami dianggap orang gila, orang stress, orang yang tidak punya pekerjaan, yang memang pas kalau ditujukan kepada kami berempat pada waktu itu karena banyak masyarakat yang tidak tahu tujuan kami. Nah, yang ingin, yang tahu ya hanya kami berempat itu, nanti Goa Pindul akan menjadu seperti apa. ... (desawisatabejiharjo.net, 2019).

Selain sebagai perintis, OPW juga menyatakan organisasi ini sebagai pengelola resmi Goa Pindul. Kata “resmi” dimanifestasikan dalam operasional organisasi berdasarkan SK Pokdarwis dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, operasional layanan wisata yang hanya melibatkan pemandu wisata berlisensi, dan mengokohkan pondasi organisasi dengan badan usaha yaitu *Commanditaire Vennootschap* (CV) setelah BUMDes Maju Mandiri didirikan di Bejiharjo.

Berbeda dengan OPW, BUMDes Maju Mandiri membangun narasi baru tentang sejarah pengelolaan Goa Pindul. Jika OPW menyatakan sebagai perintis pembangunan wisata Goa Pindul dan melakukan negasi peran serta pemerintah desa dan kabupaten dalam proses tersebut, BUMDes menciptakan narasi yang berbeda. Menurut versi BUMDes Maju Mandiri, wisata Goa Pindul yang dibuka semenjak tahun 2010 diawali dan dirintis oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan didukung oleh Bupati Gunungkidul saat itu Prof. Sumpeno dan Wakil Bupati Hj. Badingah, S.Sos (bumdesmajumandiri.id, 2019). BUMDes Maju Mandiri berhasil menggeser posisi OPW, yang beroperasi lebih lama dan mengklaim sebagai pengelola sah Goa Pindul, dengan sejumlah produk hukum yang memayungi organisasi dan produk-produk kebijakan yang mengatur OPW. Berdasarkan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Maju Mandiri Desa Bejiharjo, BUMDes mendapatkan hak penggunaan dan pengelolaan

asset Desa Bejiharjo. Aset tersebut berupa tanah kas desa, usaha simpan pinjam, tempat pengolahan sampah, aset bangunan dan barang. Pelaksana operasional BUMDes terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha. Para pelaksana tersebut dipilih berdasarkan hasil seleksi berupa ujian tertulis dan uji kompetensi yang berlangsung pada tanggal 4 April 2017. Berdasarkan hasil seleksi, peserta yang lolos untuk menempati posisi Direktur BUMDes Maju Mandiri adalah Sariyanta, S.Pd, yang menjabat sejak tanggal 3 Mei 2017 hingga sekarang. Sejak tanggal 2 Januari 2017, BUMDes Maju Mandiri secara resmi mulai mengelola sejumlah usaha milik desa di antaranya: usaha pasar dan kios desa, pengolahan sampah, simpan pinjam, persewaan, pengadaan barang dan jasa, *event organizer*, dan wisata. Visinya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bejiharjo. Sedangkan misinya yaitu: (1) pengembangan usaha ekonomi melalui segala bidang sesuai potensi di wilayah Desa Bejiharjo, (2) membantu pembangunan wilayah desa melalui sektor usaha ekonomi, (3) membantu pemerintah desa melalui peningkatan pendapatan asli desa, (4) membantu pemerataan perekonomian masyarakat desa, dan (5) membantu pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya manusia (Desa Bejiharjo, 2017). Sejak berdirinya BUMDes Maju Mandiri, hak pengelolaan Goa Pindul diserahkan sepenuhnya kepada lembaga baru ini. Berbekal sejumlah surat perizinan, diantaranya: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), TDUP Daya Tarik Wisata Tirta, dan Analisis Dampak Lingkungan. Berbekal dokumen-dokumen tersebut, BUMDes mulai melakukan penataan wisata Goa Pindul dan memaksa operator-operator untuk mengurus perizinan serta membuat perjanjian kerja sama dengan BUMDes. Hal ini wajib dilakukan jika operator ingin terus beroperasi di Goa

Setelah menguraikan teknologi wacana yang digunakan oleh OPW dan BUMDes Maju Mandiri, posisi keduanya sebagai subjek praktik wacana pemberdayaan berbasis wisata di Goa Pindul pun bisa dijelaskan. Menurut Foucault, subjek tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Relasi kuasa mengubah manusia menjadi subjek melalui tiga mode objektifikasi. Mode pertama adalah objektifikasi manusia dalam paradigma keilmuan. Manusia menjadi subjek dan objek kajian ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu. Mode

kedua ialah objektifikasi dalam praktik pembedaan-pembedaan atribut manusia, misalnya: orang gila dan orang waras, orang jahat dan orang baik, orang sakit dan orang sehat. Mode ketiga yakni objektifikasi berdasarkan cara manusia menjadi subjek dengan mengidentifikasi diri mereka dalam hubungan dengan struktur yang lebih besar, misalnya: orientasi seksual (Smart, 2002: 103-104).

Dalam konteks pengelolaan Goa Pindul, identifikasi posisi subjek bisa ditelusuri dari mode objektifikasi kedua. Pada mode objektifikasi ini, OPW dan BUMDes Maju Mandiri melekatkan atribut yang berbeda satu dengan yang lain. Pemisahan atribut tidak disebutkan secara lugas, melainkan kita bisa menemukannya dari beberapa kata kunci yang muncul saat wawancara, informasi di situs resmi organisasi, dan dokumen audio visual. OPW menggunakan kata “perintis” dan “operator resmi” untuk memisahkan atributnya dengan BUMDes dan agen lain. Jika OPW adalah perintis dan operator resmi, maka agen yang lain “pewaris” dan “ilegal”. Atribut perintis membuat OPW menempati posisi sebagai subjek yang lebih awal mempunyai pengetahuan tentang Goa Pindul dan proses pengembangannya. Atribut operator resmi merupakan upaya OPW menolak kehadiran joki-joki yang beroperasi secara ilegal dan sering kali menyesatkan wisatawan.

BUMDes melakukan objektifikasi terhadap keberadaan OPW dengan penggunaan kata “berhak” dan “taat hukum”. Jika BUMDes Maju Mandiri memposisikan sebagai organisasi yang berhak dan taat hukum dalam proses pengelolaan Goa Pindul, maka OPW dan agen lainnya “tidak berhak” dan “melanggar hukum”. Atribut pemisah ini mendorong BUMDes mengeluarkan kebijakan yang memaksa OPW menaati kepemimpinan BUMDes, sebagai pemegang hak pengelolaan Goa Pindul, sejak tahun 2017. BUMDes membuat surat perjanjian kerja sama yang memangkas peran OPW sebagai pengelola seluruh kegiatan wisata di Goa Pindul menjadi sekedar penyedia jasa pemandu wisata saja. Syarat kerja sama juga mengharuskan OPW mengubah organisasi menjadi badan usaha CV karena berdasarkan Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012: 27-28), Pokdarwis semestinya tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi. OPW yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dicap sebagai operator yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian ini, posisi subjek OPW dan BUMDes berada dalam relasi wacana pemberdayaan dan wacana hukum. Pada perkembangannya, OPW pun mengikuti perubahan konfigurasi agen yang memegang akses penuh terhadap wisata Goa Pindul. Meski tetap menyematkan atribut “perintis” dan “operator resmi”, OPW telah berubah statusnya dari Pokdarwis menjadi CV. Demikian pula dengan BUMDes Maju Mandiri, organisasi ini terus memperkuat posisinya sebagai subjek utama pengelolaan Goa Pindul dengan mengurus beragam perizinan dari pemerintah. Organisasi ini memayungi dirinya dengan sejumlah surat keputusan resmi dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Mengungkap Relasi Kuasa di Goa Pindul

Kekuasaan, menurut Foucault, selalu berkaitan dengan pengetahuan sehingga tidak ada relasi kuasa tanpa relasi pengetahuan. Kekuasaan memproduksi pengetahuan sehingga pengetahuan melayani kekuasaan dan juga sebaliknya, pengetahuan selalu mengandaikan adanya relasi kuasa (Smart, 2002: 70). Upaya mengungkap relasi kuasa dalam pengelolaan wisata Goa Pindul bisa kita telusuri dari awal munculnya konflik menahun yang melibatkan agen-agen internal dan eksternal Bejiharjo.

Pada periode pertama, tahun 2010-2014, konflik di kawasan Goa Pindul melibatkan tokoh-tokoh Dewa Bejo sebagai operator pertama Goa Pindul dalam wadah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Perpecahan internal organisasi Dewa Bejo mendorong munculnya operator baru, yaitu Wirawisata dan Pancawisata (kompas.com, 2013). Selain kedua operator tersebut, pada periode ini, operator Tunas Wisata muncul sebagai kelompok yang diduga dibentuk oleh Atiek Damayanti, seorang warga Bejiharjo yang menginginkan hak pengelolaan Goa Pindul karena kepemilikan tanah yang terletak di atas Goa Pindul (radarjogja.co.id, 2014). Pada periode kedua, tahun 2014-2016, keempat operator (Dewa Bejo, Wirawisata, Pancawisata, dan Tunas Wisata), Pemerintah Desa Bejiharjo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kepolisian Resor Gunungkidul, dan Atiek Damayanti terlibat dalam konflik terbuka hingga muncul beragam demonstrasi (radarjogja.jawapos.com, 2014).

Pada periode ketiga, dari tahun 2016 hingga saat ini, konflik memasuki babak baru. Aktor yang terlibat dalam konflik pun berubah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kepolisian Resor Gunungkidul, dan Atiek Damayanti tidak lagi terlibat dalam konflik. Kasus perebutan kepemilikan tanah dan hak pengelolaan Goa Pindul telah resmi dihentikan oleh pengadilan (semarangpos.com, 2017). Penghentian kasus yang melibatkan aktor-aktor tersebut tidak serta merta mengurangi ketegangan di Bejiharjo. Kehadiran tujuh operator baru, BUMDes Maju Mandiri, biro perjalanan ‘nakal’, joki, dan media online Pidjar melahirkan bentuk konflik baru. Peraturan tentang izin pengelolaan Goa Pindul, status badan hukum organisasi, *ticketing system*, sertifikasi pemandu, dan jam layanan pengunjung menjadi isu utama yang menyulut konflik pariwisata secara terselubung di Bejiharjo saat ini.

Isu tentang kepercayaan mewarnai relasi OPW dan BUMDes Maju Mandiri. OPW berpendapat bahwa BUMDes hanyalah kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang kesulitan untuk mengambil alih pengelolaan Goa Pindul. Pemerintah daerah dinilai hanya melakukan klaim atas keberhasilan yang dilakukan masyarakat Bejiharjo dalam mengembangkan Goa Pindul menjadi daya tarik wisata minat khusus yang saat populer di Gunungkidul sejak tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga dianggap tidak memberikan kontribusi dalam proses tersebut. Saat konflik mulai muncul pada tahun 2013 dan mencapai klimaksnya pada tahun 2014-2015, OPW memandang pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikannya secara tegas. Bernaung di bawah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pemerintah Kabupaten Gunungkidul justru mendorong hadirnya organisasi baru untuk mengelola Goa Pindul.

Berawal dari hilangnya kepercayaan kepada pemerintah Gunungkidul, OPW lantas meragukan kinerja BUMDes. Belum setahun BUMDes beroperasi, OPW terlibat dalam demonstrasi untuk memprotes kebijakan BUMDes yang memberikan izin operasi bagi pemandu yang tidak bersertifikat (Pidjar.com, 2018). Ia juga mencurigai adanya penyelewengan dana yang dilakukan BUMDes karena data pengunjung milik OPW tidak sama dengan data milik BUMDes. Selisih angkanya cukup banyak, yaitu lebih dari 1000 orang. Kecurigaan ini semakin menguat ketika salah

satu media online di Gunungkidul memberitakan dugaan penyelewengan dana ini.

Di sisi lain, BUMDes menganggap OPW sulit diajak bekerja sama. Direktur BUMDes menilai OPW seharusnya melakukan pembenahan kinerja organisasi karena secara hukum BUMDes yang sekarang mempunyai hak untuk mengelola Goa Pindul, sementara OPW adalah mitra dalam melayani wisatawan, khususnya dalam hal kependudukan wisata. BUMDes juga menilai OPW masih memiliki ego yang tinggi sehingga belum mau menerima keberadaan organisasi ini. Meskipun demikian, BUMDes terus berusaha memberikan pemahaman tentang peran masing-masing organisasi dalam pengelolaan Goa Pindul saat ini. Hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan oleh OPW adalah perlu payung hukum untuk setiap tindakan dan keputusan. Oleh karena itu, BUMDes merasa selangkah lebih maju karena payung hukum organisasi dan operasional usaha sudah jelas.

Sejak awal kehadirannya di Bejiharjo, OPW dan BUMDes terus berusaha membangun legitimasi atas urgensi keterlibatannya dalam pengelolaan Goa Pindul. OPW mengumpulkan pemberitaan di media cetak dan media online tentang kegiatan pengelolaan Goa Pindul sejak awal hingga keterlibatannya dalam konflik dalam bentuk klipring sederhana. Selain itu OPW memiliki akun media sosial, mulai dari Facebook, Instragram, hingga yang terbaru adalah kanal youtube. OPW juga mempunyai situs online yang tidak hanya menawarkan paket wisata, tetapi juga menceritakan asal mula Goa Pindul dan proses pembukaan Goa Pindul. OPW juga menunjukkan bukti kerja sama yang ia lakukan dengan KKN-PPM UGM pada tahun 2011 dalam bentuk banner, dokumentasi kegiatan, dan buku-buku administrasi. Secara tidak langsung, dokumen-dokumen dan informasi di akun-akun media online ini menunjukkan klaim bahwa OPW merasa paling paling memahami dan berhak mengelola Goa Pindul, bukan organisasi yang lain.

Sementara itu, BUMDes yang belum memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam pengelolaan Goa Pindul selalu berlandung di balik status hukum dan sejumlah perizinan yang dimilikinya. BUMDes merasa memiliki legitimasi yang tinggi karena terbentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54, Musdes adalah

forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, BUMDes mengantongi sejumlah perizinan, diantaranya: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), TDUP Daya Tarik Wisata Tirta, dan Analisis Dampak Lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbekal dokumen-dokumen tersebut, BUMDes mulai melakukan penataan wisata Goa Pindul, termasuk memaksa operator-operator untuk mengurus perizinan dan membuat perjanjian kerja sama dengan BUMDes jika ingin terus beroperasi di Goa Pindul.

KESIMPULAN

Analisis wacana sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap wacana dominan dalam pembangunan objek wisata Goa Pindul dan relasi kuasa antaragen, yaitu OPW dan BUMDes Maju Mandiri. Hasil analisis mengungkapkan bahwa wacana dominan dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul adalah wacana pemberdayaan, khususnya pemberdayaan masyarakat. Meskipun OPW dan BUMDes menggunakan wacana yang sama, tetapi keduanya memiliki praktik wacana yang berbeda. Sejak 2017, BUMDes mulai menempati posisi yang berpengaruh dan dominan dalam hal pengambilan keputusan, praktik, dan implementasi strategi pembangunan. Di permukaan, OPW sepertinya bersedia bekerja sama dan mengikuti kebijakan BUMDes, tetapi praktik wacana mereka menggambarkan bahwa ada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap organisasi baru ini.

Relasi kuasa antara OPW dan BUMDes Maju Mandiri merupakan relasi yang saling mendominasi. Relasinya cenderung setara, namun berada pada praktik wacana yang berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma berpikir dan tindakan yang saling berselisih satu dengan yang lain, karena ada mode objektifikasi secara terus menerus. Perbedaan manifestasi kekuasaan dalam praktik wacana inilah yang menyebabkan konflik tidak bisa benar-benar terselesaikan.

Ada beberapa implikasi praktis yang bisa diambil dari hasil penelitian ini. Pertama, konsep pengelolaan Goa Pindul perlu diatur ulang.

Konsep tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu diterapkan dalam proses tersebut. Ini adalah saatnya kembali pada wacana pemberdayaan masyarakat yang menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, berkeadilan, dan memperhatikan kelestarian alam, khususnya ekosistem Goa Pindul. Membangun ulang wacana pembangunan wisata Goa Pindul dan mempraktikkannya bersama-sama akan menghindarkan para agen dari konflik yang berkepanjangan. Kedua, OPW dan BUMDes perlu lebih banyak menggunakan pendekatan kultural untuk mengkomunikasikan pemikiran dan kebijakannya agar lebih bisa dipahami dan diterima oleh satu sama lain, daripada menggunakan pendekatan struktural dan hukum. Ketiga, pemerintah di tingkat desa dan kabupaten bisa bertindak sebagai mediator antara BUMDes dan OPW untuk menyeimbangkan relasi kuasa di antara mereka sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak bersikap pragmatis terhadap situasi di Goa Pindul. Keempat, upaya mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat di Bejiharjo sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan agar industri pariwisata bisa berjalan lebih sehat. Secara keseluruhan, meskipun kunjungan wisatawan ke Goa Pindul masih cukup tinggi, dari segi keberlanjutan daya tarik wisata sangat bergantung pada berbagai penataan kelembagaan. Relasi antar agen pembangunan pariwisata yang setara, meskipun sulit diciptakan, tetapi hal ini perlu diupayakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan pariwisata bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Bejiharjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Bejiharjo, BUMDes Maju Mandiri, dan operator Goa Pindul atas izin dan informasi yang diberikan selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku, Jurnal, dan Peraturan Pemerintah

Arribas-Ayllon, Michael & Walkerdine, Valerie. (2008). "Foucauldian Discourse Analysis", in Willig, Carla & Stainton-

Rogers, Wendy. *The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology*. Sage Publications.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2017). *Gunungkidul dalam Angka 2017*. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Bowen, D., Zubair, S. & Altinay, L. (2017). "Politics and Tourism Destination Development: The Evolution of Power". *Journal of Travel Research* Vol. 56(6) 725-743, DOI: 10.1177/0047287516666719.

Bramwell, Bill & Meyer, Dorothea. (2007). "Power and Tourism Policy Relations in Transition". *Annals of Tourism Research*, Vol. 34, No. 3, pp. 766-788, doi:10.1016/j.annals.2007.03.009.

Calvès, Anne-Emmanuèle. (2009). "Empowerment: the history of a key concept in contemporary development discourse" in *Revue Tiers Monde*. Volume 200, issue 4. <https://www.cairn-int.info/revue-revue-tiers-monde-2009-4-page-735.htm>.

Collins, Patricia Hill. (2000). *Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment 2nd ed.* Routledge.

Daldal, Asli. (2014). "Power and Ideology in Michel Foucault and Antonio Gramsci: A Comparative Analysis". *Review of History and Political Science*. June 2014, Vol. 2, No. 2, pp. 149-167. American Research Institute for Policy Development.

Foucault, M. (1980). "The history of sexuality", in C. Gordon (ed.), *Power/Knowledge*. Brighton: Harvester.

Hall, Stuart. (1992). "The West and the Rest: Discourse and Power", in Hall, Stuart & Gieben, Bram (ed.), *Formations of Modernity*. Polity Press.

Karim, Abdul. (2017). "Pariwisata dan Kekuasaan: Sebuah Telaah Foucauldian". *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1(1): 81-106. DOI:1021776/ub.sosiologi.jkrbsb.2017.001.1.07.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. <https://www.kemenparekraf.go.id/index.php/post/pedoman-kelompok-sadar-wisata-dan-petunjuk-penyelenggaraan-saka->

- pramuka-pariwisata. Diakses tanggal 5 Juli 2020.
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Kendall, Gavin & Wickham, Gary. (1999). *Using Foucault's Methods*. Sage Publications.
- Keyim, Parhad. (2018). "Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonisahti". *Journal of Travel Research* Vol. 57(4) 483-494, DOI: 10.1177/0047287517701858.
- Kurniawan, Irvan. (2017). "Dinamika Penguasaan Kepemilikan Tanah dalam Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul" (*Tesis*). Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Lenao, Monkogoi. (2017). "Community, state and power-relations in community-based tourism on Lekhubu Island, Botswana". *Tourism Geographies*, 19:3, 483-501, DOI: 10.1080/14616688.2017.1292309.
- Muslim, Aziz. (2017). "Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 13, No. 1.
- Nunkoo, Robin. (2017). "Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital?" *Journal of Destination Marketing & Management* 6 pp. 277-285, DOI: 10.1016/j.jdmm.2017.10.003.
- Nunkoo, Robin & Gursoy, Dogan. (2016). "Rethinking the Role of Power and Trust in Tourism Planning". *Journal of Hospitality Marketing & Management* 25:4, 512-522, DOI: 10.1080/19368623.2015.1019170.
- Pemerintah Desa Bejiharjo. (2016). Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Pemerintah Desa Bejiharjo. (2016). Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Maju Mandiri Desa Bejiharjo.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Purnaya, I Gusti Ketut. (2015). "Relasi Kuasa Pascareformasi dalam Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua". *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 01, April 2015.
- Saputro, Purnomo Adi. (2015). "Analisis Dampak Kegiatan Pariwisata di Kawasan Pesisir Selatan Gunungkidul terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul" (*Tesis*). Program Pascasarjana, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Smart, Barry. (2002). *Michel Foucault*. Revised Edition. Routledge.
- Suhadi, Nur. (2017). "Strategi Pengembangan Pariwisata Alternatif di Padukuhan Gembyong Desa Ngoro-Oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul" (*Tesis*). Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Syahrul. (2017). "Kajian Kerusakan Lingkungan Fisik akibat Kegiatan Pariwisata di Pantai Pulang Syawal Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta" (*Tesis*). Magister Pengelolaan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Yusuf, Helmi HI. (2017). "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Studi di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul" (*Tesis*). Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wijaya, I Nyoman. (2012). "Relasi-Relasi Kekuasaan di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali". *Humaniora*, Vol. 24, No. 2 Juni 2012: 141-155).
- Xue, Lan & Kerstetter, Deborah. (2018). Discourse and Power Relations in Community Tourism, *Journal of Travel Research* Vol. 57(6) 757-768, DOI: 10.1177/0047287517714908.

Sumber Media Online

- Alam, Dian Mentari. (2018). Perkembangan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia yang Mendukung SDG.

- <https://balilatfo.kemendes.go.id/view/detil/220/perkembangan-program-pemberdayaan-masyarakat-di-indonesia-yang-mendukung-sdg>. Diakses tanggal 1 Juli 2020.
- BUMDes Maju Mandiri. (2019). Unit Wisata. https://www.bumdesmajumandiri.id/2019/10/unit-wisata_18.html. Diakses tanggal 5 Juli 2020.
- Desa Bejiharjo. (2017). Pengelolaan Desa Budaya Bejiharjo. <https://www.bejiharjo-karangmojo.desa.id/first/artikel/284-Pengelolaan-Desa-Budaya-Bejiharjo>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- _____. (2017). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *Dokumen tidak dipublikasikan*.
- Dewa Bejo Goa Pindul. (2018). Di Balik Nama Besar Goa Pindul. <https://desawisatabejiharjo.net/di-balik-nama-besar-go-pindul/> Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Kompas.com. (2013). Sengketa Pengelolaan Goa Pindul Belum Berakhir. <https://travel.kompas.com/read/2013/02/26/1212023/Sengketa.Pengelolaan.Gua.Pindul.Belum.Berakhir>. Diakses tanggal 31 Desember 2018.
- Koran.tempo.co. (2011). PNPM Gagal Tekan Kemiskinan di Desa? <https://koran.tempo.co/read/nasional/307599/pnpm-gagal-tekan-kemiskinan-di-desa?> Diakses tanggal 2 Juli 2020.
- Pidjar.com. (2018). Demo Tuntut Sertifikasi Pemandu Goa Pindul, Massa Sempat Rusak Kantor Bumdes. <https://pidjar.com/demo-tuntut-sertifikasi-pemandu-go-pindul-massa-sempat-rusak-kantor-bumdes/998/> Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. (2019). Sejarah. <https://www.pnpm-mandiri.org/Sejarah.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2020.
- Radarjogja.co.id. (2014). Konflik Pindul Makin Meruncing. <https://www.radarjogja.co.id/2014/03/03/konflik-pindul-makin-meruncing/>. Diakses tanggal 31 Desember 2018.
- Radarjogja.jawapos.com. (2014). Bersihkan Oknum Korup Goa Pindul. <https://radarjogja.jawapos.com/2014/09/30/bersihkan-oknum-korup-go-pindul/>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Republika.co.id. (2016). Pendapatan Pariwisata Gunungkidul Melonjak Hampir 6 Kali Lipat. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/11/odcely382-pendapatan-pariwisata-gunung-kidul-melonjak-hampir-6-kali-lipat>. Diakses tanggal 15 Desember 2019.
- Semarangpos.com. (2017). Gugatan Praperadilan Gua Pindul Ditolak. <http://m.semarangpos.com/2017/12/14/gugatan-praperadilan-gua-pindul-ditolak-876730>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.